

Judul : Menhub kebut regulasi bagasi berbayar
Tanggal : Kamis, 31 Januari 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Menhub Kebut Regulasi Bagasi Berbayar

JAKARTA-Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi akan membahas dengan jajaran dan pihak terkait soal aturan penerapan bagasi berbayar. Hal itu pasca adanya permintaan dari Komisi V DPR RI untuk menunda penerapan bagasi berbayar.

Menhub, Budi Karya Sumardi mengatakan, pembahasan tersebut akan dimulai kemarin hingga tiga hari ke depan. "Akan diputuskan, ya tiga sampai empat hari lah," kata Budi Karya saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/1).

Menurut Budi Karya, Kementerian Perhubungan akan melihat sesuai dengan aturan di undang-undang. Kemenhub, juga akan mengatur agar masyarakat tidak keberatan karena adanya bagasi berbayar. "Hari ini

(kemarin, Red) akan saya finalkan, bahwa beban-beban masyarakat itu akan menjadi lebih ringan," ujar Budi.

Budi Karya menuturkan, alternatifnya macam-macam. Dari membatalkan kegiatan itu sampai memberikan diskon. "Tapi hari ini (kemarin, Red) saya akan rapatkan, saya akan dengar dari beberapa pihak," imbuhnya.

Budi Karya menambahkan, nantinya dalam tiga hingga empat hari, Kemenhub akan menghasilkan semacam peraturan atau surat edaran dari eselon I terkait bagasi berbayar tersebut. Direktur Operasional Lion Air, Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan, akan mengikuti aturan pemerintah ihwal bagasi berbayar terlebih bila aturan itu di-

terbitkan Kemenhub. Menurut dia, desakan soal bagasi berbayar itu harus juga melihat antara bertahannya industri penerbangan dengan kebutuhan masyarakat. "Ini juga harus benar-benar yang nanti akan disampaikan. Mudah-mudahan sudah melihat suatu keadilan antara kebutuhan masyarakat dan sustainability suatu perusahaan penerbangan," kata Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Diketahui, Komisi V DPR RI mendesak penundaan penerapan bagasi berbayar pada maskapai penerbangan. "Komisi V DPR mendesak Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang

terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional," kata Sigit Susiantomo, di ruang rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu juga menyampaikan meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang besaran komponen terkait tarif pesawat udara agar tidak memberatkan masyarakat dan meningkatkan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Hal itu kata dia, guna memformulasikan ulang besaran komponen tarif batas atas dan tarif batas bawah, antara lain terkait harga avtur, pajak, serta bea masuk suku cadang. (aen)